

# **POLA KOMUNIKASI PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN GEREJA YASMIN BOGOR**

Fakhrudin,<sup>1</sup>

Correspondence author: [fakhrudin@tazkia.ac.id](mailto:fakhrudin@tazkia.ac.id)

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tazkia, PPS SAA Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

Conflict is a social phenomenon that is present in social life, so that conflict is inherently means conflict will always exist in every space and time, anywhere and anytime. In this view, society is an arena of conflict or an arena of conflict and integration that is always going on. Therefore, conflict and social integration is a symptom that always fill every social life. Things that encourage the emergence of conflict and integration is the existence of similarities and differences of social interests . In every social life there is not a single human having the exact similarity, whether of ethnicity, interests, will, will, purpose and so on. From each conflict there are some that can be resolved, but some can not be resolved resulting in some acts of violence. Violence is a symptom that can not overcome the root of the conflict, causing violence from the smallest model of violence to war. Good communication is needed in problem solving and is important in achieving the success of a life in the community. Conflicts can be resolved well if communication is harmoniously established between the community, both verbal and non verbal. Effective communication patterns are one of the most important conditions in relation to resolving conflicts among conflict resolution societies that arise in marriage life especially in different national marriages, the subject of education because women and men are distinctly different in terms of communication. This is what then makes researchers want to know more deeply about how the picture polakomunikasi in conflict resolution

Keywords: Patterns, Communication, and Conflict.

## **PENDAHULUAN**

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, agama dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Antara konflik dan integrasi adalah dua sisi yang selalu hadir

dalam setiap kehidupan masyarakat, kapan dan dimana saja. Persoalan konflik termasuk permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat (keamanan), dimana peran pemerintah dalam merespon persoalan konflik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah. Maka dari itu kehadiran pemerintah mutlak diperlukan, baik konflik itu terjadi antara suku, etnis, agama, persoalan remaja, ekonomi maupun masalah keretakan rumah tangga di suatu masyarakat tertentu. Salah satu cara mengatasi konflik adalah dengan pola komunikasi. Komunikasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi sosial manusia. Bahkan lebih dari itu bahwa komunikasi menjadi elemen penting dalam setiap pola tindakan individu dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Komunikasi berfungsi meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Melalui komunikasi setiap manusia dapat membangun hubungan yang baik sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat. Disisi lain komunikasi juga dapat memicu terjadinya konflik. Perlu diingat bahwa komunikasi adalah bagian mutlak dari proses budaya yang adab. Komunikasi merupakan proses penciptaan kebersamaan dalam makna. Dalam masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai demokratis, sulit terjadi komunikasi yang wajar karena semua makna menjadi hak tafsir si penguasa. Konflik horizontal (konflik sosial, etnis, ras, dan agama antar warga), disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola pesan-pesan verbal dan non-verbal. Masyarakat pendatang cenderung menggunakan bahasa yang berbeda dengan penduduk lokal meskipun telah ada kesepakatan (tidak tertulis) untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, akan tetapi logat atau aksen yang digunakan oleh masing-masing orang yang berinteraksi masih mengikuti logat atau aksen dari sukunya masing-masing. Kondisi ini menyebabkan sulitnya menerima pesan yang disampaikan, lalu terjadi kesalahan interpretasi, hingga akhirnya memicu konflik. Kegagalan pengelolaan pesan tidak hanya terjadi secara verbal (lisan), pesan non-verbal juga ikut menyumbang terjadinya konflik antar warga. Walaupun komunikasi dianggap sebagai salah satu pemicu konflik, tetapi disisi lain komunikasi dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mengatasi komplik, sehingga komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengatasi berbagai komplik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka timbul permasalahan. Bagaimana pola komunikasi dalam mengatasi konflik di masyarakat?

## **PEMBAHASAN**

### **a. Konsepsi Dasar Konflik dan Komunikasi**

Konflik Terdapat banyak definisi mengenai konflik yang bisa jadi disebabkan oleh perbedaan pandangan dan setting dimana konflik terjadi. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi diantara pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau sub-unit yang sedang berselisih akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka mengungguli yang lainnya .

Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa konflik merupakan sebuah situasi dimana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang diantara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain, prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitan dengan dirinya atau hanya jika ada kegiatan yang tidak cocok. Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Menurut Leopod Von Wiese Yang dikutip Oleh J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto menyatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Dari pengertian konflik tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya yang disertai dengan kekerasan. Konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dari pengertian konflik tersebut, maka konflik merupakan kondisi yang terjadi akibat perbedaan posisi yang tidak selaras, adanya pihak yang menghalangi serta ikut campur yang mengakibatkan tujuan pihak lain tidak terpenuhi. Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Kasus konflik pendirian rumah ibadah di Bogor kompleks perumahan Yasmin dianggap sebagai salah satu konflik antara dua pemeluk agama yang berbeda, walaupun setelah dilakukan penelitian dan pengamatan konflik itu muncul karena banyak faktor dari pelanggaran kesepakatan 3 menteri, menteri agama, menteri dalam negeri, dan perumahan rakyat. Surat Keputusan (SK) 3 Menteri adalah keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2008 oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang pemberian izin tempat ibadah bagi masyarakat yang menganut agama selain Islam. Latar belakang SK ini adalah

adanya permasalahan dalam memberikan izin tempat ibadah bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia yang seringkali dianggap mengalami kesulitan dan diskriminasi. Dan sebaliknya di daerah yang muslim minoritas susah mendirikan masjid atau mushola. Sebelum adanya SK 3 Menteri, pemberian izin tempat ibadah bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1986 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Namun, pada kenyataannya, pemberian izin tersebut seringkali dianggap tidak sesuai dengan aturan dan diskriminatif terhadap masyarakat non-Muslim. Beberapa pola komunikasi yang dilakukan dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Yasmin Bogor adalah

Konsep Komunikasi Kata komunikasi dalam bahasa Inggris disebut Communication yang mempunyai makna hubungan, berita, pengumuman atau pemberitahuan. Dalam bahasa Latin komunikasi disebut Communication yang berarti sama, sama maknanya, atau mempunyai kesamaan pandangan. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila ada kesamaan makna atau pandangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Untuk mencapai kesamaan makna dalam pembicaraan atau percakapan, maka keduanya harus sama-sama mengetahui bahasa yang dipakai dalam proses komunikasi, meskipun keduanya sama-sama memakai bahasa yang sama belum tentu mempunyai kesamaan makna tentang isi komunikasi. Yang paling penting dalam komunikasi adalah terjadinya hubungan manusiawi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Pengertian komunikasi di atas baru pengertian secara umum, karena baru sampai pada tahap memahami isi pesan. Jadi sifatnya informatif. Bila dilihat lebih dalam, pengertian komunikasi dapat dibagi dua yaitu pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi secara paradigmatis. Pengertian komunikasi secara umum dapat digambarkan bahwa: dalam kehidupan sosial, proses komunikasi tidak pernah berhenti sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kehidupan manusia yang senantiasa mengandalkan hubungan interaksi dengan sesamanya dan melahirkan kehidupan manusia yang bersifat kemasyarakatan, sistem kemasyarakatan bisa terwujud dengan baik apabila terjadi interaksi. Interaksi bisa terjadi apabila berlangsung komunikasi. Sedangkan pengertian Komunikasi secara paradigmatis banyak didefinisikan oleh para ahli. Secara terminologi, komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme mengadakan hubungan antara sesama manusia dengan mengembangkan semua lambang-lambang dan pikiran bersama dengan arti yang menyertainya.

Pengertian komunikasi tersebut mengisyaratkan bahwa dalam komunikasi antara seseorang dengan yang lainnya terjadi hubungan atau interaksi. Dan hubungan tersebut secara bersama-sama mencurahkan seluruh pikirannya melalui lambang-lambang yang berarti. Carel I. Hovland sebagaimana yang dikutip oleh Onong Oechiana Efendy mengemukakan bahwa, komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat umum. Definisi I Hovland tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dijadikan obyek studi komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum dan pembentukan sikap. Kedua hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik. Perlu diketahui bahwa pendapat, perilaku, dan sikap

seseorang dapat saja berubah manakala komunikasi yang disampaikan kepada seseorang itu komunikatif. Karena itu maka dalam komunikasi, antara komunikator dengan komunikannya harus sama-sama memahami makna yang terkandung dalam pesan atau informasi yang disampaiannya. Edwar Depari memberi pengertian komunikasi sebagai penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan dengan maksud mencapai kebersamaan. Lambang-lambang yang dipergunakan dalam penyampaian pesan adalah lambang verbal simbol dan non verbal simbol. Definisi di atas menunjukkan bahwa dalam komunikasi minimal unsur komunikasi yang harus ada yaitu : penyampai pesan, gagasan, atau isi pesan dan penerima pesan. Komunikasi adalah jembatan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak-ke pihak lain, dari komunikator kepada komunikan atau dari Tuhan kepada hamba-Nya dan dari sesama umat manusia, sehingga pengirim pesan tersebut dapat menyampaikan informasi atau ajaran kepada komunikannya. Dengan demikian komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar manusia melalau pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Berdasar dari pengeritian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur komunikasi meliputi: (1). Komunikator. (2). Pesan, (3). Media, (4).Komunikan atau khalayak, (5).Efek, (6) tujuan, (7) lingkungan. Dengan demikian komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan/ khalayak melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Ketujuh unsur komunikasi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dalam membentuk hubungan manusia dengan hubungan sosialnya. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada komunikannya. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, ajaran dan lain-lain. Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan dengan yang lainnya. Dalam arti manusia memerlukan manusia lainnya ataupun kelompok yang satu memerlukan kelompok yang lainnya, sehingga kehidupan manusia baik perseorangan, maupun kelompok selalu mengadakan hubungan. Hubungan tersebut bisa berlangsung aktif bila selalu mengadakan komunikasi..

Pola komunikasi yaitu suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari suatu tujuan tertentu. Pola adalah bentuk atau model yang biasa di pakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang di timbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat di tunjukan atau terlihat. Pola Komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yang terlibat dalam Komunikasi itu adalah manusia itu. Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan itu di olahnya menjadi pesan dandi kirimkan melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima. Penerima pesan, dan sudah mengerti pesannya kepada pangirim pesan. Dengan menerima tanggapan dari si penerima pesan itu, pengirim pesan dapat menilai efektifitas pesan yang di kirimkannya. Berdasarkan tanggapan itu, pengirim dapat mengetahui apakah pesannya di mengerti dan sejauh mana pesannya di mengerti oleh orang yang di kirim pesan itu. Sisi lain untuk mengatasi konflik, maka yang sangat dibutuhkan adalah pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Konflik

merupakan suatu bentuk interaksi diantara beberapa pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan.

Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau sub-unit yang sedang berselisih akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka mengungguli yang lainnya . Konflik merupakan sebuah situasi dimana dua orang atau lebih menginginkan tujuantujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang diantara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak . Konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain, prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitan dengan dirinya atau hanya jika ada kegiatan yang tidak cocok . Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan.Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status need. Adapun penyebab konflik adalah:

a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik.Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Secara sosiologis masyarakat sedikit banyaknyaakan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Masyarakat Indonesia memiliki multi etnis yang berada di Nusantara, seperti etnis, Sunda, Batak, Dayak, Bugis-Makassar, Mandar, Tanah Toraja, Manado, Papua, Minangkabau, dan lain-lain sebagainya.Perbedaan latar belakang etnis dan budaya tersebut membentuk kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga apabila kelompok-kelompok etnis tersebut tidak terkelola dengan baik akan menjadi penyebab konflik.

c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda.Oleh sebab itu, dalam waktu yang

bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Adapaun Pola Komunikasi Dalam Penanggulangan Konflik

a. Dialog. Dialog adalah salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendidikan perdamaian kepada masyarakat yang mengalami konflik. Dengan cara ini, Pemerintah dan Tokoh masyarakat mempertemukan orang-orang yang mengalami konflik dan kemudian secara bersama-sama berdiskusi untuk menemukan dan mencapai tujuan bersama mereka. Apabila ada masyarakat yang mengalami Konflik baik pada anak-anak Muda maupun Masyarakat pada umumnya, Maka langkah perama yang dilakukan adalah mengadakan dialog dengan kedua belah pihak sehingga mencapai Kesepakatan dan tidak ada lagi gesekan antara masyarakat yang kopmlik tersebut. Dalam kasus pendirian rumah ibadah di Yasmin Bogor pihak pemda melakukan dialog dengan seluruh elemen masyarakat di sekitar pendirian rumah ibadah dan hasil dialog itu melahirkan kesepakatan tentang pemindahan atau relokasi tempat rumah ibadah yang tadinya di dekat komplek perumahan Yasmin Bogor, berpindah 1 km dari tepatnya di RT.03/RW.12, Cilendek Bar., Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat 16114

Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudahpunah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya sertaberupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam pola ini yang terjadi dikasus rumah ibadah Yasmin bogor kecenderungan saling mengklaim kebenaran masing masing pihak hingga melibatkan institusi hukum yang lebih tinggi yaitu MA

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pemberdayaan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan rumah ibadah yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya. memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karenahal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang,serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidakdi jadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Pola komunikasi ini pada kasus pendirian rumah ibadah dianggap kurang berhasil karena kemandiran untuk menyelesaikan secara mandiri justru menambah panjang dan luas persoalan pendirian rumah ibadah di Yasmin Bogor.

Peran Pemerintah Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi

disebut pranata. Koentjaraningrat menegaskan orang yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur. Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial. Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu. Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang, peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi. Peranan terkadang pula diikuti oleh tuntutan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada individu yang menempati status tertentu. Pengharapan masyarakat pada status tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud. Mengutip J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya. Tugas dari peran yang diemban oleh individu merupakan hasil kontrak dengan masyarakat yang telah memberikan wewenang itu dengan kontrak yang telah disepakati melalui mekanisme yang telah disepakati pula. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimanakah masyarakat menentukan harapan-harapannya terhadap para pemegang peran tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Kelurahan dikatakan bahwa Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (lurah) dan perangkat kelurahan. Sedangkan peringkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu. Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan A.W. Wijaya. Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Keterlibatan pemerintah di kasus pendirian rumah ibadah Yasmin Bogor peran kelurahan terdekat dimana wilayah rumah ibadah itu berdiri dilibatkan dengan secara optimal, saat persoalan di tingkat kelurahan tidak bisa diselesaikan naik ke tingkat kecamatan hingga pemerintah kota bogor dengan turunya surat ijin pendirian rumah ibadah yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bogor.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Sebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Yasmin Bogor adalah faktor perbedaan kelompok penganut agama, faktor kepentingan, faktor budaya, dan perubahan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat akibat terjadinya asimilasi penganut agama satu dengan penganut agama yang lain. Langkah yang dilakukan dalam penanganan konflik adalah meningkatkan dialog antara masyarakat dengan melibatkan unsur pemerintah dari tingkat RT, RW hingga unsur pemerintah Kota Bogor, baik yang berkaitan dengan proses pengurusan IMB, persetujuan masyarakat sekitar pendirian rumah ibadah, pengkajian bersama SK 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah, dan penerbitan SK IMB baru tentang relokasi rumah ibadah yang baru yang sudah disepakati. Selain itu mendorong kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan konflik, dan yang terakhir adalah keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat yang terlibat dengan konflik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

SK 3 Menteri, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1986 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Perda no 4 tahun 2007 nomor 4 seri E tentang pelaksanaan pemberian ijin mendirikan bangunan

Abe, A. Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonom. Daerah. Lapera Pustaka Utama : Yogyakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, Ekonomi Pembangunan II (Development Economics II) Jakarta Pusat Penerbitan Universitas Terbuka : 2004..

\_\_\_\_\_, Ekonomi Pembangunan I (Development Economics I) Jakarta Pusat Penerbitan Universitas Terbuka : 2003.

Bagong, S. Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan, Erlangga University Press, Surabaya, 2005

Budiardjo, M., Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia : Jakarta, 1985.

Cohen J.M and Uphoff. Rural Development Participation. New York. Itacha, 1980

Conyers, D., Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada, 1991

Frank, A. G., "Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi". Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1994

Gomes, F. C., Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Andi., Yogyakarta. 2003

Handoko. T. H., Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Liberty. Yogyakarta, 2003

Hasibuan, M. S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta, 2003

Isbandi Rukminto Adi. Revisi. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Jim Ife .. Community Development. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006

Kartasmita, G., Perencanaan Pembangunan Nasional. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi : Malang, 1994

- Kusumaatmadja, M., , Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan. cetakan ke 2, Alumni : Bandung,2006
- Mangkunegara, A. P., 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Maskun, S., Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta: PT Media Madya Mandala,1993
- Mikkelsen, Britha. Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2001
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman,. Analisa Data Kualitatif. UI Press: Jakarta,T.th. Munandar, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Bandung: Eresco. 1992
- Ndraha, T., Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta,1999  
Nugroho, I dan I. Dahuri, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES, 2004
- Riyadi, D. dan S. Bratakusumah, Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali :2003  
Salam, S. D.,. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Penerbit : Djambatan. 2002  
Sastropoetro, S., Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni. 1998  
Siagian, S.P., Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional., Jakarta: Penerbit CV. Haji Masagung. 1994
- Soemanto., Metode-Metode Penelitian.. Jakarta: Gramedia 2003
- Sofyandi, H., Manajemen Sumber Daya Manusia.. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008
- Suharto, E., , Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005  
Sulistiyani, A. T. dan Rosidah.,. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu: 2003  
Sumardi, M.,. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, , Jakarta: CV. Rajawali 2005
- Sumarno A.P, dan T. S. Ismet, , Dasar-Dasar Komunikasi Politik, Bandung. Alumnus Press: Bandung. 2000
- Syafiie, I.,. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Tikson. D. T., Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan Di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Makassar : Innawa. 2005
- Tjokrowinoto, M, Pembangunan : Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. ., 1996